

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MUHAMMAD FAIZ BAMAZEZA
NPP 29.0562

*Asdaf Provinsi Lampung
Program Studi Studi
Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:
faiz.bamazeza@gmail.com

ABSTRACT

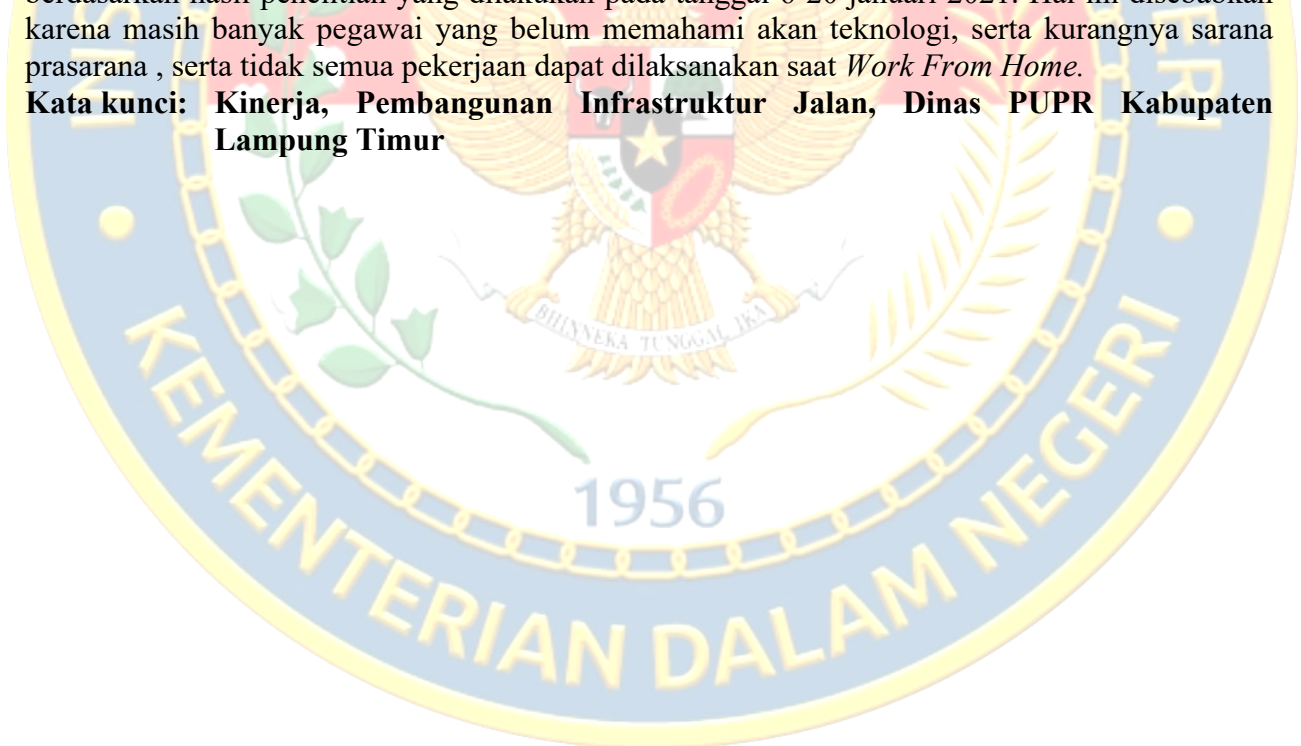
Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). To achieve the expected development achievements, it is necessary to increase the performance of various agencies which can be seen from the performance of their apparatus. In this study, researchers will examine the relationship between effective and efficient performance in influencing the implementation of infrastructure development optimally. Because in carrying out development, there are still various obstacles faced by the PUPR Office of East Lampung Regency..***Purpose:** *To find out and analyze and describe the performance of the PUPR Service in optimizing the development of road infrastructure in East Lampung Regency.* **Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation* **Result:** *: The performance of the responsiveness of the apparatus in the PUPR Service of East Lampung Regency has been running quite well and the performance of the Responsibilities has been carried out according to the correct administrative procedures. As well as the accountability performance of the East Lampung Regency PUPR Service in providing excellent service to the community has been going well, but there is still a lack of facilities and infrastructure and apparatus resources as a support in improving services in the East Lampung Regency PUPR Service environment..* **Conclusion:** *Employee performance in Work From Home at the Kendari City Personnel and Human Resources Development Agency has not been maximized, based on the results of research conducted on January 6-20 2021. This is because there are still many employees who do not understand technology, as well as the lack of infrastructure, and not all work can be carried out during Work From Home.*

Keywords: *Performance, Road Infrastructure Development, East Lampung Regency PUPR Service*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Untuk mencapai pencapaian pembangunan yang diharapkan maka perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai instansi yang dapat dilihat dari kinerja aparaturnya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji hubungan antara kinerja yang efektif dan efisien dalam mempengaruhi berjalannya pembangunan infrastruktur secara optimal. Karena dalam menjalankan pembangunan masih ditemukan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisa serta mendeskripsikan Kinerja Dinas PUPR dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** kinerja Responsivitas aparatur di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan cukup baik dan kinerja Responsibilitas sudah terlaksana sesuai prosedur administrasi yang benar. Serta kinerja akuntabilitas Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun masih di temukan kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur sebagai penunjang dalam meningkatkan pelayanan pada lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. **Kesimpulan:** Kinerja Pegawai dalam *Work From Home* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari belum maksimal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 6-20 januari 2021. Hal ini disebabkan karena masih banyak pegawai yang belum memahami akan teknologi, serta kurangnya sarana prasarana , serta tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan saat *Work From Home*.

Kata kunci: Kinerja, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan sebuah bangsa pastinya memiliki kepentingan dan arah tujuan yang hendak direalisasikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan adalah tugas pokok para aparatur selaku pegawai yang mendedikasikan diri pada negara dan rakyat. Dinas Pekerjaan Umum adalah instansi yang dibawah oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kehadiran Dinas Pekerjaan Umum memberi warna terhadap pembangunan di Daerah. Dalam menjalankan dan mengawasi pembangunan infrastruktur di daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peranan yang penting. Kelengkapan dan kualitas infrastruktur dapat menjadi pendorong perekonomian daerah, dan sebaliknya, ketika infrastruktur di suatu daerah berjalan buruk maka akan menjadi penghambat perekonomian, yang menyebabkan terhambatnya pembangunan pada daerah tersebut sehingga daerahnya tidak dapat berkembang dengan cepat (Martin & Rogers, 1995). Infrastruktur ialah bentuk modal publik yang dapat dalam bentuk jalan raya, jembatan, saluran drainase dll, yang merupakan bentuk nyata investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Infrastruktur jalan adalah aspek terpenting dalam mewujudkan kemajuan dan pembangunan suatu wilayah yang dilaluinya. Fungsi utama dibangunnya infrastruktur adalah sebagai sarana untuk menyambungkan dan menghubungkan antara daerah satu dengan lainnya, sehingga proses kehidupan masyarakat akan lebih mudah. Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten dengan wilayah yang bisa terbilang kecil dengan jumlah kepadatan penduduk yang cukup banyak. Dalam acara yang bertema “Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Merata” selaku Bupati Zaiful menyampaikan adanya peningkatan anggaran Kabupaten Lampung Timur dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan. M. Dawam Rahardjo selaku Bupati Lampung Timur menyampaikan bahwa “Pemerintah Daerah telah mencanangkan perbaikan ruas jalan dan mengusulkannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Pengusulan perbaikan ruas jalan sepanjang Kec. Batanghari sampai kec. Sekampung. Selain itu, dari Kec. Sekampung hingga Kec. Sekampungudik. Menurutnya, perlu adanya perbaikan ruas jalan di daerah Lampung Timur, dan diharapkan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi”. Kondisi Kinerja di awal periode RPJMD ruas Jalan Kabupaten Lampung Timur dalam kondisi memadai hanya 64,80% dari total panjang jalannya. Tahun 2019, penambahan panjang jalan hanya mencapai setengah dari target dan kondisi jalan hanya mengalami sedikit kenaikan. Suksesnya pembangunan infrastruktur jalan harus didukung oleh semua pihak baik penyelenggara pemerintahan pada umumnya maupun masyarakat pada khususnya. Untuk mencapai pencapaian pembangunan yang diharapkan maka perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai instansi yang dapat dilihat dari kinerja aparaturnya. Untuk mencapai pencapaian pembangunan yang diharapkan maka perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai instansi yang dapat dilihat dari kinerja aparaturnya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji hubungan antara kinerja yang efektif dan efisien dalam mempengaruhi berjalannya pembangunan infrastruktur secara optimal. Karena dalam menjalankan pembangunan masih ditemukan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan yang timbul di lokasi penelitian yang dapat diidentifikasi yaitu berkaitan dengan : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di kalangan pegawai Dinas PUPR belum optimal, Jumlah ASN di Dinas PUPR belum sesuai dengan kebutuhan, Pembangunan Infrastruktur Jalan belum optimal dan belum merata, dan Rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan Infrastruktur Jalan.

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dengan judul penelitian **“KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Untuk mencapai pencapaian pembangunan yang diharapkan maka perlu adanya peningkatan kinerja dari berbagai instansi yang dapat dilihat dari kinerja aparaturnya. Pada penelitian ini,peneliti akan mengkaji hubungan antara kinerja yang efektif dan efisien dalam mempengaruhi berjalannya pembangunan infrastruktur secara optimal. Karena dalam menjalankan pembangunan masih ditemukan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Dhita Flafiya Indriyani (Skripsi, 2018)), dengan judul Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Adapun Hasil penelitian ini yaitu Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan jalan daerah, Terdapat beberapa kendaraan yang mengangkut muatan berlebih yang melintasi jalanan sehingga menyebabkan kerusakan jalan, Minimnya usaha Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam mensosialisaikan ke masyarakat mengenai pelaksanaan jalan daerah.Kedua, Ngongoloy, Kimbal, dan Waworundeng(Jurnal, 2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Adapun hasil penelitian ini yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam melaksanakan pemeliharaan jalan kurang membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Kelurahan, bahkan Masyarakat yang memiliki kerusakan jalan di wilayah mereka dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado memiliki kendala di Sumberdaya Anggaran dan Sumberdaya Peralatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berlandaskan penjelasan pada latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan, penelitian ini ditujukan guna merealisasikan tujuan, yaitu:Untuk mengetahui dan menganalisa serta mendeskripsikan Kinerja Dinas PUPR dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Timur; Untuk mengetahui dan menganalisa serta mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi Dinas PUPR dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Timur; Untuk mengetahui dan menganalisa serta mendeskripsikan upaya dari Pemerintah Daerah dan Dinas PUPR untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan.

II METODE

Sugiyono (2012:29) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Timur

3.1.1 Produktivitas

Produktivitas menurut Dwiyanto merupakan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pelaksanaan tugas, namun juga pencapaian hasil yang dikaitkan melalui efektivitas pelayanan. Kinerja aparatur dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperhatikan keseimbangan antara efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi demi mencapai efektivitas pelayanan yang nantinya berdampak langsung kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang umum dan bidang bina marga yang menjadi fasilitator dan penggerak serta penanggung jawab terhadap setiap pembangunan dan bina marga di Kabupaten Lampung Timur baik fisik maupun non-fisik. Eksistensi pembangunan infrastruktur jalan saat ini di Kabupaten Lampung Timur belum memenuhi standar kriteria pembangunan nasional sebagai ibukota provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan aturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan. Bekerja sama dengan developer dalam penegakan aturan pembangunan merupakan salah satu program yang termasuk dalam pengendalian pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Timur yang menjadi fokus dalam pengendalian besar pembangunan. Program pengendalian yang berkala terhadap pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik. Dengan bekerja sama dengan developer dan terus melaksanakan pengendalian maka akan meminimalisir pelanggaran pembangunan liar dan memberikan kemudahan dalam pengawasan proses pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan efisiensi dan ketepatan biaya, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki anggaran khusus terkait pengadaan pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Timur yang dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Bagian keuangan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mengakui bahwa untuk pengoptimalan pembangunan jalan, membutuhkan anggaran yang cukup besar dikarenakan jalan yang akan terus diperbaiki dan dikembangkan dalam jumlah yang besar dan luas serta membutuhkan pengelolaan secara berkala oleh pihak – pihak di lapangan.

3.1.1.1 Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto, dalam teorinya kualitas layanan merujuk pada hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan bagian informasi yang paling mudah didapatkan karena berkaitan langsung dengan fenomena di lapangan dan pendapat masyarakat yang menikmati dan merasakan hasil pelayanan Organisasi Pemerintahan yang berkaitan. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang membantu setiap organisasi dalam pencapaian tujuan dan meningkatkan produktivitas hasil kerja

yang berdampak pada tercapainya pelayanan prima serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menempatkan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu kebutuhan pokok organisasi yang wajib terpenuhi. Pemenuhan sarana dan prasarana di Dinas PUPR sudah terpenuhi dan sesuai dengan standar kriteria serta telah menyusun proyeksi beberapa kebutuhan sarana dan prasarana untuk satu hingga dua tahun mendatang. Ketersediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas terkait secara lengkap dan tidak memiliki kecacatan secara langsung memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan dan eksistensi infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Timur yang dapat mendukung aksesibilitas di Kabupaten Lampung Timur sebagai tolak ukur indikator kualitas layanan berikutnya adalah mengenai transparansi informasi yang ditujukan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup termasuk didalamnya pembangunan jalan sebagai wujud pelayanan secara profesional dan tidak diskriminatif. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang meningkatkan kualitas layanan tersebut melalui pemaksimalan pembangunan jalan untuk mempermudah akses umum. Berdasarkan pengamatan peneliti masih ada beberapa jalan yang masih perlu dievaluasi dan diperhatikan kualitasnya dikarenakan tidak terawat dengan baik dan tergolong cukup rusak sehingga dapat membahayakan pengguna jalan.

3.2 Responsivitas

Responsivitas dijelaskan oleh Dwiyanto sebagai suatu kemampuan birokrasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun misi yang disesuaikan dengan misi Kabupaten Lampung Timur guna memberikan batasan tugas pokok dan fungsi dalam menyusun agenda dan mengembangkan program pelayanan publik sehingga mampu memahami kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan misi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam menciptakan pembangunan infrastruktur terus dilakukan demi terciptanya Kabupaten Lampung Timur yang berkualitas serta ramah lingkungan, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam memaksimalkan tugas perencanaan dan pemanfaatan ruang dengan menyusun peta pembangunan jaringan jalan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan lahan dan alih fungsi guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga sampai saat ini pencapaian mengenai peningkatan pemenuhan perluasan dan pembangunan jalan masih dalam proses yang sedang dijalankan oleh Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dikarenakan lamanya proses pergantian rugi kepada masyarakat dan dana yang harus sesuai terhadap anggaran setiap tahun. Pembangunan dan perluasan jalan merupakan suatu program Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam menciptakan kabupaten dengan tingkat aksesibilitas baik dan mendukung keterpaduan wilayah.

3.2.1 Responsibilitas

Menurut Dwiyanto, responsibilitas merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik secara eksplisit maupun implisit. Sehingga responsibilitas dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi pekerjaan dengan program kerja yang telah dibuat tanpa melanggar aturan yang dibuat dan tertib administrasi. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bersinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mendukung berlangsungnya program serta sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program. Pelaksanaan kerjasama dilakukan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan bidang fisik dan bina marga, perencanaan bidang ekonomi, perencanaan bidang sosial budaya. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap dampak pembangunan liar tersebut membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini perlunya kerja sama untuk memaksimalkan kinerja satuan organisasi perangkat daerah memang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama demi seutuhnya kesejahteraan masyarakat.

3.3 Akuntabilitas

Menurut Dwiyanto, akuntabilitas memiliki pengertian mengenai besaran kebijakan dan kegiatan birokrasi publik yang tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat untuk kepentingan publik, menandakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menggunakan setiap kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku sebagai acuan dalam merumuskan program dan melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan pelayanan prima dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur bab IV pasal 66 mengenai tata kerja pimpinan dan unit kerja pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bahwa setiap pimpinan dan unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang baik dalam lingkungan dinas maupun unit lain. Koordinasi dan sinkronisasi antar unit dilaksanakan secara rutin guna menjaga komunikasi dan transparansi informasi dalam internal unit yang akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala unit/ bagian kepada Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang untuk selanjutnya dievaluasi dan ditindaklanjuti. Sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan program dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagai wujud pelaksanaan tertib administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dhita Flafiya Indriyani (Skripsi, 2018)), dengan judul Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah . Adapun temuan penelitian ini yaitu Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan jalan daerah, Terdapat beberapa kendaraan yang mengangkut muatan berlebih yang melintasi jalanan sehingga menyebabkan kerusakan jalan, Minimnya usaha Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam mensosialisasikan ke masyarakat mengenai pelaksanaan jalan daerah. Ngongoloy, Kimbal, dan Waworundeng (Jurnal, 2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Adapun temuan penelitian ini yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam melaksanakan pemeliharaan jalan kurang membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Kelurahan, bahkan Masyarakat yang memiliki kerusakan jalan di wilayah mereka dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado memiliki kendala di Sumberdaya Anggaran dan Sumberdaya Peralatan. Pembaharuan temuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sudah tergolong cukup baik namun masih harus ditingkatkan lagi. Konsep Produktivitas kegiatan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pelaksanaan tugas, namun juga pencapaian hasil yang dikaitkan melalui efektivitas pelayanan, Hasil analisis menunjukkan kualitas pelayanan dapat dinilai dari beberapa indikator yakni kinerja kualitas pelayanan sudah berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masih perlu di tingkatkan lagi, Hasil analisis menunjukkan Responsivitas dapat dinilai dari beberapa indikator yakni kinerja Responsivitas aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan cukup baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sudah tergolong cukup baik namun masih harus ditingkatkan lagi. Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 3 januari 2022 – 16 januari 2022 peneliti dapat menyimpulkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan analisis peneliti lakukan terhadap indikator kinerja yaitu: Konsep Produktivitas kegiatan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pelaksanaan tugas, namun juga pencapaian hasil yang dikaitkan melalui efektivitas pelayanan: Hasil analisis menunjukkan kualitas pelayanan dapat dinilai dari beberapa indikator yakni kinerja kualitas pelayanan sudah berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masih perlu di tingkatkan lagi mengenai sarana dan prasarana yang di sediakan kepada aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur sendiri, guna dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya; Hasil analisis menunjukkan Responsivitas dapat dinilai dari beberapa indikator yakni kinerja Responsivitas aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan cukup baik; Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara eksplisif maupun implisif; Akuntabilitas publik menunjukkan pada beberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik tunduk pada rakyat. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Chabib, Soleh, dan Suropto saja. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lampung Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chabib, Soleh, dan Suripto. 2011. *Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Dhita Flafiya Indriyani.(2018), “*Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah*”
- Ngongoloy, Kimbal, dan Waworundeng(2019)” *Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan.*”
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Sugiyono. 2013. *Meode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang barang/jasa pemerintah, dan aturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan.

